Pertanggungjawaban Pidana Pengawas Pemasaran Kredit Pada Perusahaan Finance

Criminal Accountability for Credit Marketing Supervisors at the Finance Company

Iskandar

Dewan Kehormatan dan Kode Etik Dosen Universitas Halu Oleo

E-mail: iskandar.007@yahoo.com

Oheo K. Haris

Pascasarjana Universitas Halu Oleo

E-mail: oheokh@gmail.com

Herman

Pascasarjana Universitas Halu Oleo

E-mail: hermanmurhum2009@gmail.com

Abstract: *Ratio decidendi as stated in the decision 139/Pid.b/2104/PN. Kendari. That the judge handed down the verdict to the defendant with the consideration that the defendant had committed fraudulent payments from the consumer and harmed the company. The defendant was charged with Article 374 of the Criminal Code because his actions fulfilled the following elements: Who, and the element of embezzlement committed by the person holding the goods and dealing with work or position and the defendant received a salary from his work. Criminal Responsibility of Supervisors of Credit Market in Finance Companies in criminal acts of fraud because work relations are considered as criminal acts of embezzlement should be by weighting. The act of the defendant is a criminal act of concorsus because it has fulfilled the requirements of the concorsus criminal offense or more than one criminal act and judges the judge in imposing a sentence of 4 months in prison to the defendant for not being right.*

Keyword: *ratio decidendi; supervisor of credit marketing; embezzlement crime*

Abstrak: *Ratio decidendi sebagaimana yang tertuang dalam putusan 139/Pid.b/2104/PN. Kendari. Bahwa hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran yang konsumen dan merugikan perusahaan. Terdakwa dijerat dengan pasal 374 KUHPidana karena perbuatannya memenuhi unsur: Barang siapa, dan unsur penggelapan yang dilakukan oleh yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan terdakwa mendapat upah dari pekerjaannya. Pertanggungjawaban Pidana Pengawas Pemasaran Kredit Pada Perusahaan*

Finance dalam tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja dinilai sebagai tindak pidana penggelapan seharusnya dengan pemberatan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana concorsus karena telah memenuhi syarat tindak pidana concorsus atau lebih dari satu tindak pidana dan menilai hakim dalam menjatuhkan hukuman selama 4 bulan penjara kepada terdakwa kurang tepat.

Kata kunci: Rasio Decidendi; Pengawas Pemasaran Kredit; Pidana Penggelapan

PENDAHULUAN

Hubungan kerja yang dilakukan dapat berdampak kepada kelalaian yang disebabkan oleh faktor manusia (pekerja) dalam mengimplementasikan hubungan kerja, wujud penyimpangan kewenangan itu salah satunya dapat mengarah kepada tindak pidana penggelapan, suatu tindakan yang berangkat dari kepentingan-kepentingan yang keluar dari tujuan yang telah digariskan, baik dalam perjanjian kerja maupun pencapaian tujuan perusahaan. Kerugian *financial* yang terjadi adalah pengusaha atau pemilik perusahaan mengalami kerugian keuangan karena adanya penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya.

Penggelapan menurut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana yang dapat dituntut di muka pengadilan. Dalam Pasal 374 menyebutkan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.¹

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan, serta termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), penjualan kredit dilakukan oleh perusahaan dengan cara proses seleksi calon konsumen dalam memberikan kredit terhadap konsumen, perusahaan *Finance* dalam menjalankan roda perusahaannya membutuhkan karyawan dengan maksud memberikan kemudahan. Dalam kesepakatan kredit antara konsumen dan perusahaan. Keuntungan yang didapat oleh konsumen atau nasabah ialah mendapatkan pencairan dana atau mendapatkan kendaraan dari perusahaan pembiayaan yang dapat dipakai untuk kepentingan maupun kebutuhannya sesuai dengan pembayaran pengajuan pinjaman dana dan kemampuan bayarnya, Sedangkan bagi perusahaan, apabila konsumen memperoleh keuntungan dari

¹ KUHP Pasal 374

kredit angsuran konsumen yang membayar anggurannya tiap bulannya sesuai dengan kesepakatan kreditnya yang telah disepakati dalam Surat perjanjian kredit antara perusahaan dan konsumen.

Perusahaan/lembaga/institusi *finance* (*consumer financing institution*) menggunakan jasa tenaga kerja yang disebut supervisor yang merupakan pengawas permasalahan dan kredit, dan di tiap-tiap perusahaan *finance* supervisor memiliki istilah yang berbeda beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainya akan tetapi tanggung jawabnya tetap sama, Namun banyak terjadi kejahatan yang dilakukan justru oleh pengawas pemasaran kredit itu sendiri sebagai orang yang memiliki jabatan.

Jabatan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana², sejalan dengan hal itu, David P. Biaco mengatakan *Embezzlement is a form of fraud that involves misappropriation of money or property by someone who has been entrusted with it by virtue of their position or employment*. "Penggelapan adalah bentuk penipuan yang melibatkan penyalahgunaan uang atau properti oleh seseorang yang telah dipercayakan kepadanya berdasarkan posisi atau pekerjaan mereka.³ Seperti halnya pada putusan No. 139/Pid.B/2014/PN Kendari dimana dalam putusan tersebut pelaku kejahatan merupakan supervisor atau pengawas permasalahan kredit dari itu sendiri. Hal ini menarik dikaji lebih jauh karena ada hubungan antara kejahatan penggelapan yang dilakukan individu/supervisor sebagai bagian dari perusahaan dan konsumen pengguna jasa perusahaan Pembiayaan (*finance*). Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan dua rumusan masalah yakni Apakah *ratio decidendi* tentang pertanggungjawaban pidana pada perkara pada perkara No 139/Pid.B/2014/PN Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana pengawas pemasaran kredit pada perusahaan *finance*.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan Norma hukum dan adakah Norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai

² Herman. *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Halu Oleo Law Review (HORLEV), Volume 2 Issue 1, March 2018. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4192/3255>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

³ David P. Bianco *Embezzlement*, Reference for Business, <https://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Eco-Ent/Embezzlement> 2019, diakses tanggal 2 Maret 2019.

dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan Norma hukum atau prinsip hukum. ⁴Dengan menggunakan pendekatan Kasus, Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konsep.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

***Ratio decidendi* Pada Perkara Nomor 139/PID. B/2014/PN. Kendari**

Secara konsep, undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa⁵. Terdakwa dapat dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan di mana terdakwa melakukan penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang di berikan oleh perusahaan karena terdakwa di percayakan secara sah mengambil angsuran dari konsumen namun uang angsuran tersebut terdakwa tidak serahkan kepada perusahaan tersebut. Jika dikaitkan pendapat Lamintang yang menyatakan arti tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.⁶ Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Dakwaan penuntut umum Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pada dakwaan primair bahwa terdakwa menggelapkan angsuran konsumen, terdakwa merupakan karyawan, dan terdakwa menyebabkan kerugian PT. Nusantara Surya Cipta Dana mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4045.000.-(empat juta empat puluh lima ribu rupiah). Seluruh dakwaan jaksa penuntut hanya menitik beratkan pada kerugian perusahaan yang dilakukan oleh karyawannya, tanpa melihat kerugian yang dialami oleh konsumen itu sendiri. Pada putusan Majelis hakim menetapkan dengan pidana penjara 4

⁴ Peter Mahmud Marsuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. VII, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 47.

⁵ Oheo K. Haris, *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017, <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663/427>, diakses tanggal 28 Februari 2019, hlm.11.

⁶ P.A.F Lamintang-C.Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung; Nuasa Aulia, 2010, hlm. 109.

bulan dikurangi masa-masa tahanan yang dijalankan selama proses perkara berlangsung. Dan ditetapkan beberapa barang bukti dan denda kepada terdakwa.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa selama empat (4) bulan penjara, hal ini karena terdakwa secara sah dan terbukti melakukan penggelapan uang angsuran konsumen yang seharusnya diserahkan kepada perusahaan dan terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan. yang mana pidana penjara merupakan salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara, hal ini karena perbuatan terdakwa dianggap melawan hukum, Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengambil angsuran kredit kendaraan dari empat orang konsumen.

Unsur sifat melawan hukum terdakwa, terdakwa melakukan penggelapan yang dimana terdakwa memiliki hubungan kerja dan menerima gaji/upah dari perusahaan, terdakwa juga merupakan orang yang diberikan kepercayaan oleh perusahaan dalam hal ini melanggar pasal 374 “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, sehingga pasal ini biasa disebut dengan Penggelapan dengan Pemberatan, di mana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb. menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Dari ketentuan pasal di atas, terdakwa memenuhi unsur pasal 374 KUHPidana yang meliputi 3 unsur:

1. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*).

2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya. Bahwa benar terdakwa memegang uang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya sebagai Pengawas Pemasaran Kredit pada PT. Nusantara Surya Cipta Dana.
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang). Terdakwa adalah karyawan di PT. Nusantara Surya Cipta Dana sebagai karyawan yang mempunyai jabatan Pengawas Pemasaran Kredit dan mendapatkan upah/gaji setiap bulan.

Artinya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila terhadap perbuatan itu mengandung sifat melawan hukum, dan oleh karena sifat melawan hukum ini pula yang menjadikan pelakunya dapat dijatuhi pidana. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dalam KUHP dikenal batas hukuman minimum, yakni dalam hal lamanya hukuman penjara dan hukuman kurungan. Lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya Lima belas tahun, sedangkan lamanya hukuman kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa penggelapan angsuran cenderung tidak memuat gabungan pidana karena gabungan pidana menitik beratkan pada unsur pembalasan. Hal ini dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusan menilai hanya dari satu sisi yakni hanya menilai dari sisi kerugian perusahaan PT. Nusantara Surya Cipta Dana, tanpa menilai kerugian yang dialami oleh. Konsumen sebagai pengguna jasa perusahaan yang berakibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu⁷

Pertama keseimbangan di sini adalah antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

Kedua Penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan

⁷ Ibid. hlm. 105.

dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau Intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

Ketiga Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Keempat, Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

Kelima Ratio decidendi hal ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari Perundang-Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Mengenai *ratio decidendi*: *Ratio decidendi* adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.⁸ Artinya sebagaimana yang tertuang dalam putusan 139/Pid.b/2104/PN. Kendari. Bahwa hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran yang konsumen sebesar Rp. 4.045.000. Dengan dakwaan alternatif yang diajukan jaksa

⁸ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 475.

penuntut umum melanggar pasal 372 KUHPidana dan 374 KUHPidana. Majelis hakim menjerat terdakwa dengan Pasal 374 KUHPidana karena memenuhi unsur: Barang siapa, dan unsur penggelapan yang dilakukan oleh yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan terdakwa mendapat upah dari pekerjaannya. Terpidana dipidana dengan hukuman 4 bulan penjara.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah.⁹ Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkret, kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat, Menambah Undang-Undang apabila perlu. Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- a) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Sebelum melangkah lebih lanjut mengenai teori ppidanaan, terlebih dahulu kita mengetahui tindak pidana itu sendiri. *Strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana.

⁹ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 204.

¹⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986, hlm. 74.

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukuman. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹ Menurut Pompe¹² perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Sedangkan Van Hamel¹³ menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*Strafbaar feit*" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu sendiri, akan tetapi tindak pidana biasa disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*Strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- 1) Suatu perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu di larang dan di ancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.

Pada tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam KUHP. Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP memiliki unsur-unsur yang terkandung dari sebuah tindak pidana sehingga seseorang yang telah melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di dalam perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya. Dua hal tersebut yaitu kelakuan dan akibat.¹⁴

¹¹ Adami Chazawi. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Grafindo, 2002, hlm. 69.

¹² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 182.

¹³ Zainal Abidin. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 225

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015. hlm. 64-69

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pembedaan, adalah: "Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).¹⁵ Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: *pertama*, tindak pidana dirumuskan dalam perumusan baik nama maupun unsur-unsurnya. *Kedua*, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja. dan *ketiga*, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur - unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.¹⁶

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pembedaan beranggapan bahwa pembedaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pembedaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁷

Kesimpulannya *Ratio decidendi* dalam putusan 139/Pid.b/2104/PN. Kendari. Bahwa hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran yang konsumen sebesar Rp. 4.045.000. Dengan dakwaan alternatif yang diajukan jaksa penuntut umum melanggar Pasal 372 KUHPidana dan 374 KUHPidana. Majelis hakim menjerat terdakwa dengan Pasal 374 KUHPidana karena memenuhi unsur: Barang siapa, dan unsur penggelapan yang dilakukan oleh yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan terdakwa mendapat upah dari pekerjaannya. Terpidana dipidana dengan hukuman 4 bulan penjara.

Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan di mana terdakwa melakukan penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang di berikan oleh perusahaan karena terdakwa di percayakan mengambil angsuran dari konsumen namun uang angsuran tersebut terdakwa tidak serahkan kepada perusahaan tersebut hal ini sesuai pendapat Lamintang

¹⁵ Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*. Jakarta: Alfabeta. 2010, hlm. 21.

¹⁶ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011. hlm. 99-100

¹⁷ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. ?.

yang menyatakan: arti tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya Pidanaan terhadap terdakwa dalam hal ini pelaku penggelapan dinilai berdasarkan teori absolut bahwa penjatuhan hukum yang diberikan kepada terdakwa berasal dari kejahatan penggelapan itu sendiri yang menimbulkan penderitaan. Penderitaan dalam hal akibat adanya kerugian pada perusahaan dan konsumen, terdakwa dalam putusan ini di berikan penderitaan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa selama 4 bulan penjara karena penggelapan angsuran cenderung tidak memuat teori gabungan pidanaana karena gabungan pidanaana dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusan menilai hanya dari satu sisi yakni hanya menilai dari sisi kerugian perusahaan tanpa menilai kerugian yang dialami oleh konsumen yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT. Nusantara Surya Cipta Dana.

berdasarkan teori relatif dalam konsep pidanaana yang di kemukakan oleh Leonard bahwa tujuan pidanaana yang di jatuhkan oleh terdakwa akibat kejahatan penggelapan uang angsuran konsumen, tidak sejalan dengan teori ini karena pada dasarnya tujuan dari teori relatif adalah untuk mencegah perbuatan dan melindungi kepentingan masyarakat dengan rendahnya putusan ini peneliti menilai tidak ideal karena terdakwa telah merugikan dua pihak yakni konsumen sebagai pengguna jasa dan perusahaan sebagai penyedia jasa.

Pertanggungjawaban Pidana Pengawas Pemasaran Kredit Pada Perusahaan *Finance*

Karena diawali dengan adanya perjanjian konsumen dengan perusahaan. Penggelapan yang dilakukan oleh karyawan dalam hal ini pengawas pemasaran kredit menimbulkan beberapa kerugian selain kerugian yang dialami perusahaan kerugian juga dialami oleh konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen ialah karena tanggung jawab terhadap angsuran tetap berjalan serta mengenai denda akibat adanya keterlambatan angsuran juga tetap berjalan. Sementara kerugian bagi perusahaan selain kerugian materi akan berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut dan Penggelapan

oleh pengawas pemasaran kredit yang didakwa dengan pasal 374 KUHPidana seharusnya tidak diputus hanya dengan pidana penjara 4 bulan karena penggelapan tersebut merupakan *penggelapan dengan pemberatan* dan selain merugikan pihak perusahaan dan juga merugikan konsumen.

Pada kasus penggelapan uang angsuran kendaraan roda dua yang dilakukan oleh karyawan pada PT. Nusa Surya Cipta Dana tersebut memenuhi unsur pokok berupa unsur kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain atau instansi terkait (lembaga pembiayaan) yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata “dengan sengaja”. Adanya pembuktian unsur subyektif di dalamnya berupa kesengajaan pelaku penggelapan dan benar melahirkan implikasi-implikasi berdasarkan fakta hukum:

1. Menghendaki” atau “bermaksud” menguasai uang angsuran secara melawan hukum.
2. “Mengetahui”/“menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah angsuran milik konsumen yang akan di setorkan ke perusahaan.
3. Mengetahui”/“menyadari” bahwa angsuran tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
4. Mengetahui” bahwa angsuran tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Dari semua kasus yang melanggar ketentuan dari pihak *leasing* terfokus pada penyelesaian penggelapan yang dilakukan oleh karyawan dimana kasus ini sudah masuk ke ranah hukum pidana karena melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat pula kasus tersebut dilimpahkan ke kepolisian dengan laporan penggelapan untuk memberikan keefektivitasan terhadap suatu Undang-Undang guna menerapkan unsur pidana pada kasus tersebut.

Proses yang dilakukan PT. Nusa Surya Cipta Dana sebagai mana yang telah dijalankan dan di atur sesuai peraturan terhadap suatu perusahaan, pada awalnya perusahaan mungkin menurunkan beberapa karyawan untuk melakukan penagihan angsuran terhadap konsumen tentang kejelasan suatu barang yang telah di miliki dengan itikad baik, dan ternyata konsumen sudah menyerahkan angsuran tersebut kepada karyawan namun tidak langsung di serahkan ke kasir perusahaan, maka perkara tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib sebagai laporan tindak pidana penggelapan dengan tuduhan pasal 372 dan 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cara ini dilakukan dengan harapan agar polisi dapat menyita kendaraan tersebut, cara ini cukup ampuh mengingat dengan dipanggil oleh polisi melalui surat panggilan yang menuduhkan tindak

pidana sesuai prosedur yang memerlukan penetapan/persetujuan Pengadilan Negeri, sehingga si pelaku dapat dipidanakan sesuai dengan ketetapan sanksi yang telah disebutkan.

Kasus tersebut masuk pada klasifikasi hukum penggelapan dengan pemberatan dengan jelas di atur adanya tindak pidana penggelapan pada Pasal 374 dengan diyakini secara yuridis delik penggelapan dengan unsur untuk menguasai benda secara melawan hukum dan mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dan dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP).

Pada Pasal 374 dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan tetapi dalam konteks perbuatan dan niat yang berbeda dengan pasal 372 pembedanya terdapat atas dasar suruhan orang lain guna mendapatkan upah ataupun atas dasar kerja sama dengan pihak perusahaan atau orang dalam karyawan untuk keuntungan bersama, jadi secara jelas pasal 372 tidak dapat digunakan pada kasus penggelapan uang angsuran yang terjadi di perusahaan PT. Nusa Surya Cipta Dana melainkan pasal 374 yang secara jelas mengandung unsur tindak pidana penggelapan tersebut.

Kesimpulan mengenai Analisa hukum terhadap tindakan pidana penggelapan uang angsuran Konsumen di perusahaan PT. Nusa Surya Cipta Dana oleh karyawan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja di PT. Nusa Surya Cipta Dana dan karyawan itu sendiri. Pelaku atau karyawan tersebut dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum yang sepatutnya diketahuinya guna mendapatkan keuntungan secara pribadi, tindakan tersebut masuk pada tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang diatur pasal 374 dinilai sudah tepat karena isi dari pasal tersebut berupa ketentuan-ketentuan yang berbeda pada penggelapan yang dilakukan oleh karyawan, rumusan pada pasal 374 sendiri berupa tindakan penggelapan yang didasarkan atas adanya hubungan kerja dimana pelaku merupakan karyawan pada PT. Nusantara Surya Cipta Dana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁸

Roscoe Pound dalam Romli Atmasasmita mengatakan pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibilty*, *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana di sini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan oleh nilai *Deontologis* bahwa suatu kehendak menjadi baik sebab bertindak karena kewajiban begitu pun sebaliknya, sehingga asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang didasarkan pada nilai keadilan harus disandingkan dengan asas legalitas yang didasari pada nilai kepastian. Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁰

Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan

¹⁸ Moeljatno. *Op.cit.*, .hlm. 41

¹⁹ Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan II, Bandung: Mandar Maju, 2000. hlm. 65

²⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010. hlm. 48

atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur yaitu: *Pertama* Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggung jawabkan dari si pembuat. *Kedua* Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*) Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui Akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. *Ketiga* Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.²¹

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut.

Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:²²

- 1) Kesengajaan sebagai Maksud Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
- 2) Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu

²¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 130

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: S. Grafrika. 2005. hlm. 15

akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin Akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2 yaitu:²³

- 1) Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga Akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- 2) Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga Akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan dia seharusnya memperhitungkan Akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*Actus Reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Dalam kasus ini perbuatan terdakwa melakukan penggelapan unsur perbuatan terdakwa (*actus Reus*) diikuti dengan keadaan sebagai orang yang bertanggung jawab atas angsuran atau dengan adanya kewenangan sebagai bagian dari perusahaan. Mengenai keadaan sifat batin si pembuat (*mens rea*) terdakwa memang telah mengetahui secara pasti jika perbuatan penggelapan itu dilakukan akan merugikan perusahaan dan konsumen.

Perbuatan tersebut juga dilakukan secara beruntun dan dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga terdakwa sebagai bagian dari perusahaan merugikan perusahaan dan merugikan konsumen dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang

²³ *Ibid.* hlm. 26

telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada Undang-Undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana pengawas pemasaran kredit sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang KUHPidana pasal 374 maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya karena adanya perbuatan, Dengan kata lain pengawas pemasaran kredit yang melakukan perbuatan penggelapan angsuran perusahaan akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, Tanggung jawab tersebut akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja. Yaitu melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan perusahaan atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan pelaku akan mengakibatkan kerugian.

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut perbarengan yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau disebut juga dengan *concursum*. perlu diketahui bahwa berbicara mengenai adanya suatu *samenloop van strafbaar feit*, apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari tindakan-tindakan yang telah ia lakukan.

Sebagaimana di ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya

dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan. Dan untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah Harus ada satu keputusan kehendak, Masing-masing perbuatan harus sejenis dan Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.²⁴ Jika dikaitkan putusan terdakwa dalam hal penggelapan uang angsuran kendaraan milik konsumen pada PT. Nusantara Surya Cipta Dana harusnya tercermin *concursum* berlanjut, hal ini dikarenakan terdakwa telah beberapa kali mengambil uang setoran angsuran konsumen namun tidak di serahkan kepada perusahaan yakni PT. Nusantara Surya Cipta Dana, dan terdakwa mengetahui

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap*, Bogor: Politea, 1978, hlm. ?.

perbuatannya tersebut akan merugikan perusahaan dan konsumen, perbuatan terdakwa adalah menggelapkan uang angsuran pembayaran kendaraan bermotor konsumen pertama pada tanggal 26 November 2013, uang angsuran konsumen kedua tanggal 28 November 2013, uang angsuran konsumen ketiga yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa pada tanggal 24 Januari 2014 dan uang angsuran konsumen pada tanggal 28 Januari 2014. Penulis menilai hakim dalam menjatuhkan hukuman selama 4 bulan penjara kepada terdakwa kurang tepat karena hanya menilai berdasarkan kerugian material yang dialami oleh perusahaan tidak menilai kerugian yang dialami konsumen sebagai pengguna layanan jasa perusahaan.

KESIMPULAN

Ratio decidendi sebagaimana yang tertuang dalam putusan 139/Pid.b/2104/PN. Kendari. Bahwa hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran yang konsumen dan merugikan perusahaan sebesar Rp. 4.045.000. Dengan dakwaan alternatif yang diajukan jaksa penuntut umum melanggar pasal 374 KUHPidana dan 372 KUHPidana. Dan Majelis hakim menjerat terdakwa dengan pasal 374 KUHPidana karena memenuhi unsur: Barang siapa, dan unsur penggelapan yang dilakukan oleh yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan terdakwa mendapat upah dari pekerjaannya.

Pertanggungjawaban Pidana Pengawas Pemasaran Kredit Pada Perusahaan *Finance* dalam tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja dinilai sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagai Pengawas Pemasaran Kredit sudah tepat dimana jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 374 KUHPidana atau kedua Pasal 372 KUHPidana, di antara unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 374 KUHPidana karena terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan merupakan karyawan yang bertugas sebagai Pengawas Pemasaran Kredit yang bertugas menagih uang angsuran barang pada konsumen.

Sebagaimana di ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP

diperoleh pengertian concursus adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concurus idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concurus realis*). Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, Zainal. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan II, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Chazawi, Adami. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lamintang, P.A.F., C.Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung; Nuasa Aulia, 2010.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: S. Grafika. 2005.
- Marsuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. VII, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002.
- Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*. Jakarta: Alfabeta. 2010.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap*, Bogor: Politea, 1978.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Utrecht, E. dan Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

e-Jurnal dan Situs Internet

Bianco, David P. *Embezzlement*, Reference for Business, <https://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Eco-Ent/Embezzlement> 2019, diakses tanggal 2 Maret 2019.

Haris, Oheo K., *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017, <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663/427>, diakses tanggal 28 Februari 2019.

Herman. *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Halu Oleo Law Review (HORLEV), Volume 2 Issue 1, March 2018. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4192/3255>, diakses pada Tanggal 28 Februari 2019